

CASCADING																																																					
VISI																																																					
MISI																																																					
TUJUAN																																																					
Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel																																																					
Incremental Capital – Output Ratio (ICOR)																																																					
Ratio Government Expenditure																																																					
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan																																																					
SASARAN																																																					
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah									Meningkatnya Pemanfaatan Aset									Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah																																			
Rasio Pajak terhadap PDRB									Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah									Optim BPK Atas Laporan Keuangan																																			
Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah																																																					
PROGRAM																																																					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																																			
Efektifitas pendapatan daerah						Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset						Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran																																			
Pertumbuhan pendapatan asli daerah												Persentase penambahan nilai aset tetap						Persentase laporan keuangan tepat waktu																																			
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah																																																					
KEGIATAN																																																					
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH			PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH					KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																										
Jumlah realisasi PAD			Jumlah peningkatan PAD			Tingkat komanditer fiskal			Jumlah layanan perpajakan berbasis digital			Jumlah barang milik daerah yang tercatat			jumlah penambahan nilai aset tetap			Jumlah dokumen penganggaran yang dihasilkan					Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan		Jumlah laporan semester, LRA, Raperda dan Rangkrap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Terlaksananya pencairan dana keuangan																										
SUB KEGIATAN																																																					
PENGENDALIAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH		PENAGIHAN PAJAK DAERAH		ANALISA DAN PENGEMBARANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELOPORAN PAJAK DAERAH		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH		PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH		PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMUDAHATAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENIABARAN APBD		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELAJA DAERAH		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PEREMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN KEUANGAN		PENGLOLAAN DANA DARURAT DAN MUNDESAK		PENGLOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Dihasilkan NIDOP nya	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen ketepatan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Standar Barring Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemudahatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyalaran Batasan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten Kota																											